

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA
MISKIN (BSM) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 3 SIBOLGA**

TESIS

OLEH

**AWALIUL RAMDANI
NPM. 141801013**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga

Nama : Awaliul Ramdani

NPM : 141801013

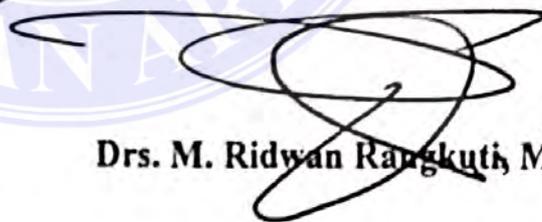
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd



Drs. M. Ridwan Rangkuth, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MA**



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 14 Nopember 2017

N a m a : Awaliul Ramdani

N P M : 141801013



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS
Pembimbing I : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
Pembimbing II : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Nopember 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20

A31B3AEF62566138

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Awaliul Ramdani

A B S T R A K

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIBOLGA

N a m a : Awaliul Ramdani
N P M : 141801013
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
Pembimbing II : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah mulai masuk ketahapan yang mendekati pencairan, untuk itu para siswa yang dinyatakan layak ramai-ramai buka rekening sendiri, karena memang pencairan dilakukan dalam bentuk transfer bank, bukan tunai. Agar pengisian formulir pembukaan rekening berjalan baik, di SMKN 3 Sibolga siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan mengisi formulir bersama sama di ruang BP/BK. Guru BP SMKN 3 Sibolga mengatakan, untuk priode ini jumlah mereka yang mendapat bantuan cukup banyak, lebih banyak dari priode yang sebelumnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga dan apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu mengetahui implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga. Berdasarkan hasil penelitian diketahui berdasarkan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, sumber-sumber sudah mampu menunjang pelaksanaan Program, tingkah laku pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, struktur birokrasi mempunyai andil yang proporsional.

Kata kunci : implementasi, bantuan siswa miskin

ABSTRACT

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PROGRAM ASSISTANCE OF POOR STUDENTS IN SCHOOL HIGH SCHOOL STATE 3 SIBOLGA

N a m e : Awaliul Ramdani
N P M : 141801013
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
Supervisor II : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Poor Student Assistance (BSM) has begun to enter the phases approaching disbursement, therefore the students who are declared eligible to open their own accounts, because the disbursement is done in the form of bank transfer, not cash. In order to fill the account opening form well, in SMKN 3 Sibolga students are divided into several groups and fill out the same form together in the BP / BK room. Teacher BP SMKN 3 Sibolga said, for this priode the number of those who get help quite a lot, more than the previous period. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Poor Student Assistance Program (BSM) in Vocational School of State 3 Sibolga City and what are the factors that become obstacles in the implementation of Poor Student Support Program (BSM) in Vocational High School Negeri 3 Kota Sibolga. While the goal to be achieved in this research is to know the implementation of the Poor Student Assistance Program (BSM) in Vocational High School State 3 Sibolga City and know the factors that become obstacles in the implementation of Poor Student Assistance Program (BSM) in Vocational School Negeri 3 Kota Sibolga. Based on the results of research known based on factors that support the implementation of the policy of communication can be achieved and achieved in accordance with expectations and objectives that have been set, the sources are able to support the implementation of the Program, the conduct of executives in accordance with their duties and functions, has a proportional share.

Keywords: *implementation, poor student assistance*

KATA PENGANTAR

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sibolga, Nopember 2017
Penulis

Awaliul Ramdani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Analisis Kebijakan Publik	10
2.2. Implementasi Kebijakan	13
2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	15
2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan.....	20
2.3. Bantuan Siswa Miskin.....	21
2.3.1. Pengertian Bantuan Siswa Miskin	21
2.3.2. Penyaluran BSM dan Sumber Pembiayaan	22
2.3.3. Penerima BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi	23
2.3.4. Kriteria Dasar Penentuan Penerima BSM	24
2.3.5. Hambatan-hambatan Pelaksanaan BSM	26
2.3.6. Ketepatan Waktu Penyaluran Manfaat BSM	28
2.3.7. Kebijakan Perbaikan Pelaksanaan Program BSM	29

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Bentuk Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisa Data	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Gambaran Umum.....	40
4.1.1. Kondisi Objektif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	40
4.1.2. Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	45
4.1.3. Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	62
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1. Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	64
4.2.1.1. Komunikasi	65
4.2.1.2. Sumber Daya Manusia	78
4.2.1.3. Kecenderungan atau Tingkah Laku	80
4.2.1.4. Struktur Birokrasi	88
4.3 Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga	92
4.4 Pembahasan	96

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Implikasi Kebijakan	102
 DAFTAR PUSTAKA	 103



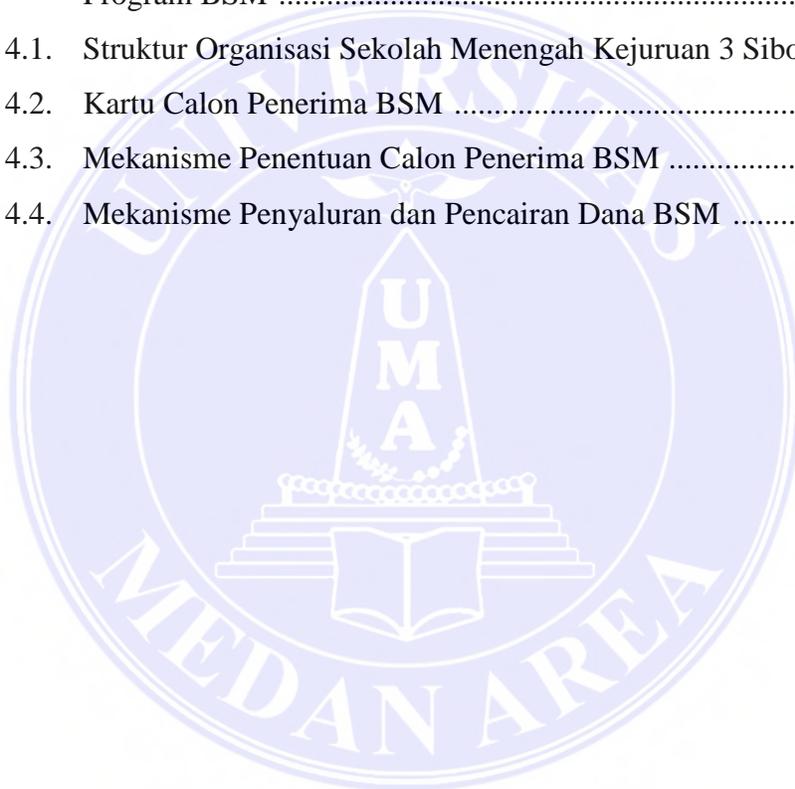
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penerima Manfaat Pogram BSM 2008-2014	23
Tabel 2.2. Evaluasi Ketepatan Besaran Bantuan Program BSM Yang Diterima Oleh Siswa	28
Tabel 2.3. Kuota Penerima Program BSM 2013 dan 2014.....	34
Tabel 4.1. Gambaran Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	61
Tabel 4.2. Gambaran Pegawai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sibolga	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Evaluasi BSM Terhadap Inclusion & Exclusion Error	27
Gambar 2.2.	Evaluasi Keberlanjutan Pendidikan Berdasarkan Kuantil Pengeluaran	29
Gambar 2.3.	Rekomendasi Perubahan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Program BSM	31
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan 3 Sibolga	60
Gambar 4.2.	Kartu Calon Penerima BSM	72
Gambar 4.3.	Mekanisme Penentuan Calon Penerima BSM	73
Gambar 4.4.	Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BSM	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa dari keluarga miskin agar dapat terus memenuhi atau melangsungkan pendidikannya maka pemerintah kembali memberikan bantuan bagi siswa miskin yang mana nama program tersebut adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mana di dalamnya dibentuk sebuah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) (Syafriarti, 2015).

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak – anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi

maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) (Syafriarti, 2015).

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004 - 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat (Kurnia Oktavia, 2014).

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung, maka dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar melalui beberapa program yang diantaranya adalah BOS, PKH, dan BSM (Kurnia Oktavia, 2014).

Bantuan Siswa Miskin termasuk dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan tentang anggaran kompensasi BBM meliputi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, bantuan pembangunan infrastruktur

pedesaan, penyesuaian besaran bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi, penyesuaian besaran dan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah raskin (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

BSM adalah salah satu dari program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program BSM berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar 425 ribu pertahun yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa miskin dalam memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan. Program BSM juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa yaitu Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa untuk sekolah sehingga dapat meringkankan beban orang tuasiswa (Kemdikbud, 2013).

Sasaran atau Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa yang orang tuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin Khusus untuk SD dan SMP, orang tua siswa terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, atau yatim piatu, siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Kemendikbud, 2013).

Implementasi program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia ternyata belum bisa dikatakan berhasil, karena permasalahan baru terjadi pada saat setelah disalurkannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke seluruh Indonesia yaitu terkait rendahnya serapan dana BSM kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan program BSM, karena permasalahan yang terjadi dapat menghambat pencapaian keberhasilan program BSM (Kurnia Oktavia, 2014).

Ketiadaan biaya untuk mengikuti pendidikan di bangku sekolah kini bukanlah sebuah alasan untuk tidak bisa bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu atau yatim piatu, serta siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari rumah tangga miskin bisa kembali bersekolah dengan program Bantuan Siswa Miskin (Elan Satriawan, 2013).

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah program nasional berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usai sekolah atau siswa dari semua jenjang pendidikan, mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan miskin. Melalui BSM diharapkan akan memberi akses yang lebih besar kepada anak Indonesia usia sekolah bisa menikmati pendidikan. Berapa pun jumlah anak dalam keluarga, asalkan termasuk jenjang usia sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, berhak mendapatkan BSM dan berhak bersekolah. Bahkan anak yang putus sekolah pun bisa kembali bersekolah dengan BSM (Elan Satriawan, 2013).

Pemerintah telah meluncurkan BSM melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah dibagikan kepada rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Program bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Dengan skema ini, rumah tangga miskin yang menerima KPS dan memiliki anak usia sekolah berhak untuk mendapatkan program BSM. Program tersebut ditujukan kepada 16,6 juta Anak Usia Sekolah yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga penerima KPS, yang berhak mendapatkan BSM adalah anak usia sekolah dari jenjang SD/SMP/SMA/SMK serta MI/MTs/MA (Elan Satriawan, 2013).

Sumatera Utara dari total 746.220 rumah tangga penerima KPS, sebanyak 1.041.608 orang anak usia sekolah berhak mendapatkan program BSM. Untuk mendapatkan BSM, rumah tangga penerima KPS cukup membawa KPS ke sekolah/madrasah tempat siswa terdaftar untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program BSM, saat membawa KPS ke sekolah, jangan lupa disertai salah satu bukti tambahan seperti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan dari kepala RT/RW/Dusun/Setara jika Kepala Keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga atau Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama Kepala Keluarga di Kartu Keluarga, besaran manfaat BSM yang akan diterima adalah sebesar Rp 225 ribu per semester untuk SD/MI, Rp 375 ribu per semester untuk SMP/ MTS, dan Rp 500 ribu per semester untuk SMA/SMK/MA (Elan Satriawan, 2013).

Terkait mekanisme penyaluran BSM setelah rumah tangga penerima KPS mendaftarkan anaknya, Kepala Sekolah/Madrasah akan membuat rekapitulasi penerima BSM di sekolah/madrasah masing-masing, dan pada pertengahan

Agustus dan akhir September 2013, akan dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program BSM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). Setelah penetapan dilakukan, maka pada akhir Agustus dan akhir September/Awal Oktober, dana BSM dapat diambil di Lembaga Penyalur, dengan membawa dokumen pendukung seperti Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari Kepala Sekolah/Madrasah, serta bukti identitas lain, seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor atau Ijazah. Selain melalui mekanisme KPS, Kepala Sekolah/Madrasah bersama Komite sekolah/madrasah dapat mengusulkan penerima BSM untuk dimasukkan kedalam Formulir Rekapitulasi Usulan. Siswa (calon penerima BSM diluar mekanisme KPS ini setidaknya harus memenuhi syarat bahwa orangtua siswa terdaftar sebagai Peserta Program Keluarga Harapan, siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu atau yatim piatu, serta siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik berasal atau dari rumah tangga miskin atau memiliki 3 (tiga) saudara yang berusia di bawah 18 tahun (Elan Satriawan, 2013).

Di Kota Sibolga Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin mengalami penyendatan pencairan dikarenakan proses pencairan yang memakan waktu lama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme penyaluran. Sekarang pemerintah mewajibkan seluruh siswa penerima di Indonesia membuka Nomor Rekening (No Rek) di Bank Negara Indonesia (BNI) yang sebelumnya ke No Rek sekolah masing-masing. Tapi ternyata hal itu terkendala, dan menurut informasi terbaru penyaluran akan dikembalikan ke No

Rek sekolah masing-masing. Perubahan mekanisme ini yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana itu.

Pada tahun ini pengajuan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sudah mulai masuk ketahapan yang mendekati pencairan, untuk itu para siswa yang dinyatakan layak ramai-ramai buka rekening sendiri, karena memang pencairan dilakukan dalam bentuk transfer bank, bukan tunai. Agar pengisian formulir pembukaan rekening berjalan baik, di SMKN 3 Sibolga siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan mengisi formulir bersama-sama di ruang BP/BK. Guru BP SMKN 3 Sibolga mengatakan, untuk periode ini jumlah mereka yang mendapat bantuan cukup banyak, lebih banyak dari periode yang sebelumnya.

Bantuan Siswa Miskin berbeda dengan beasiswa yang berkaitan dengan prestasi siswa. Bantuan ini diberikan karena situasi perekonomian keluarganya yang termasuk keluarga miskin dan rentan miskin. BOS diberikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan BSM diberikan untuk mendukung tunjangan pendidikan agar prestasi pendidikan siswa bisa meningkat (Sri Esnawati, 2014).

Dari fakta-fakta tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin di Kota Sibolga dalam mendukung dan menunjang pendidikan agar prestasi pendidikan siswa miskin di Kota Sibolga khususnya pada penelitian ini siswa SMKN 3 Sibolga bisa meningkat, maka judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga”.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga?.
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga?.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Sibolga dalam mendukung dan menunjang pendidikan agar prestasi pendidikan siswa miskin di Kota Sibolga bisa meningkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye(1981:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat,

karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutif Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik meenetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Sipa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementasion): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantaan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan

tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Afan Gaffar, 2009: 295).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan

bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 1997:71-78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994 : 144).

2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti

yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

2.3. Bantuan Siswa Miskin

2.3.1. Pengertian Bantuan Siswa Miskin

Apa yang dimaksud dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM)? Mengapa disebut sebagai “bantuan” dan apa bedanya dengan “beasiswa”? Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi

(beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Dana BSM diberikan kepada siswa mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi dengan besaran sebagai berikut:

1. BSM SD & MI sebesar Rp 225.000 per semester atau Rp 450.000 per tahun.
2. BSM SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per semester atau Rp 750.000 per tahun
3. BSM SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester atau Rp 1.000.000 per tahun.

Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswa bagi anak kurang mampu juga digulirkan pemerintah dengan nama bantuan belajar mahasiswa miskin ber-IPK 2,5, dan beasiswa bidik misi. Bidik misi bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang berpotensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi (<http://www.tnp2k.go.id/>). Besarnya anggaran untuk beasiswa miskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

2.3.2. Penyaluran BSM dan Sumber Pembiayaan

Program BSM dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian yang berbeda, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekolah reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan BSM bagi siswa yang bersekolah di Madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama

(Kemenag). Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN. Alokasinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama.

Tabel 2.1. Jumlah Penerima Manfaat Program BSM 2008-2014

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penerima Program BSM								Jumlah Manfaat Program BSM per siswa per tahun pelajaran
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	APBN-P 2013	2014	
1	SD	898.400	1.796.800	2.277.039	2.040.000	3.530.305	3.530.305	8.062.561	6.046.921	450.000
2	SMP	499.105	523.667	591.129	998.212	1.295.450	1.246.712	2.803.187	2.169.890	750.000
3	SMA	732.620	577.791	613.967	306.124	505.290	561.832	1.000.070	590.000	1.000.000
4	SMK					617.576	619.882		425.033	
Kemendikbud		2.130.125	2.898.258	3.482.135	3.344.336	5.948.621	5.958.731	12.652.723	9.191.844	
1	MI	358.492	645.556	714.642	750.000	750.000	1.436.228	1.436.228	819.336	450.000
2	MTs	274.027	544.861	645.033	600.000	600.000	950.291	950.291	785.491	750.000
3	MA	204.922	316.282	382.903	400.000	400.000	392.729	302.729	354.929	1.000.000
Kemenag		837.441	1.506.699	1.742.578	1.750.000	1.750.000	2.779.248	2.779.248	1.939.756	
Total		2.967.566	4.404.957	5.224.713	5.094.336	7.698.621	8.737.979	15.431.971	11.131.600	

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

2.3.3. Penerima BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi

Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Penerima dana Beasiswa Bakat dan Prestasi adalah siswa yang memiliki prestasi di bidang akademik/non-akademik pada SD, SMP, SMA atau SMK yang telah memenuhi kriteria sesuai pedoman/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://www.tnp2k.go.id/>).

Penerima Program BSM yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dihitung berdasarkan proporsi populasi murid di masing-masing kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut.

1. Madrasah Ibtidaiyah : 750.000 siswa
2. Madrasah Tsanawiyah : 600.000 siswa
3. Madrasah Aliyah : 400.000 siswa

2.3.4. Kriteria dasar penentuan penerima BSM

Kriteria dasar penentuan penerima Program BSM Kemendikbud adalah siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

Kriteria penerima BSM untuk Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin
3. Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya
5. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu
6. Siswa yang berasal dari panti asuhan

7. Siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PKH dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program keahlian pertanian (SMK)

Kriteria dasar penentuan penerima Program BSM Kemenag adalah Penerima BSM adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), siswa Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan) dan siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta kelas X (sepuluh) sampai kelas XII (dua belas).

Adapun kriteria siswa penerima BSM sebagai berikut:

- a. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) /Kartu BSM yang telah terdaftar sebagai penerima BSM tahun 2013 (APBN-P 2013);
- b. Siswa anggota Rumah Tangga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum terdaftar dan belum menerima BSM Tahun 2013;

Selain kriteria di atas dan apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Orangtua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau;
2. Siswa yang berasal dari Panti sosial/Panti Asuhan yang dikelola oleh Kementerian Sosial
3. Siswa korban musibah bencana alam

4. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa atau;
5. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
6. Yatim dan/atau Piatu, atau
7. Pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

Pemanfaatan dana BSM adalah untuk pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah/madrasah, uang saku siswa untuk sekolah. Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM :

1. Berhenti sekolah
2. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain
3. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal
4. Mengundurkan diri
5. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

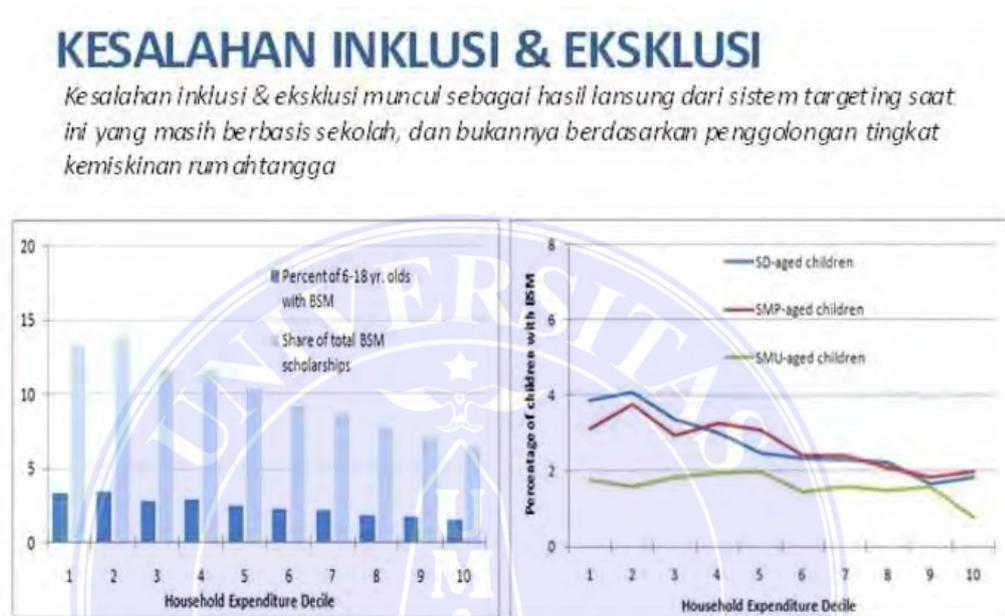
Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan BSM serta memilih siswa penggantinya. Nama siswa pengganti tersebut harus segera dikirimkan kepada lembaga penyalur melalui SK Pengganti.

2.3.5. Hambatan-hambatan pelaksanaan BSM

Beberapa hasil dari evaluasi dan studi berlanjut terhadap pelaksanaan Program BSM menunjukkan kelemahan dari program, yaitu terkait ketepatan

penetapan sasaran BSM dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima BSM dan jumlah beasiswa yang kurang memadai.

Gambar 2.1. Evaluasi BSM terhadap Inclusion & Exclusion Error



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Gambar 2.1 menunjukkan akurasi dari penetapan sasaran penerima Program BSM masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan berasal dari keluarga/rumah tangga miskin (*inclusion error*) dan banyak siswa dari keluarga/rumah tangga miskin tidak menerima manfaat BSM (*exclusion error*).

Ketepatan besaran bantuan Program BSM dalam menutupi biaya lain terkait pendidikan sangat penting dalam memberikan insentif kepada rumah tangga miskin dan rentan untuk tetap menyekolahkan anaknya di jalur formal. Hingga tahun 2012, besaran BSM belum dapat menutupi pengeluaran lain terkait pendidikan. Hasil evaluasi Sekretariat TNP2K berdasarkan data Susenas 2009

menunjukkan bahwa manfaat tersebut hanya dapat menutupi sekitar kurang lebih 30 atau 40 persen dari total biaya personal pendidikan yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga miskin.

Tabel 2.2. Evaluasi ketepatan besaran Bantuan Program BSM yang diterima oleh Siswa

Jenjang Pendidikan	Biaya Operasional Pendidikan (Rp)*	Biaya Personal Pendidikan (Rp)	Nilai Manfaat BSM di 2012 (Rp. per siswa per Tahun Pelajaran)
SD	210,000	910,000	360,00
SMP	390,000	1,390,000	550,000
SMA	940,000	1,660,000	750.000

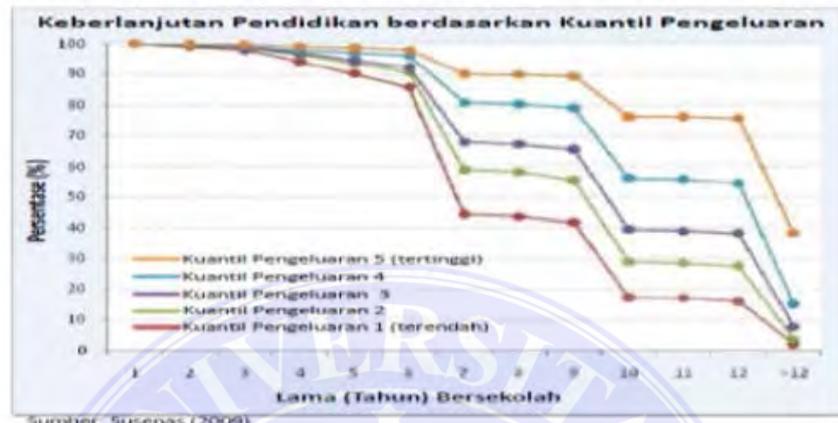
Catatan: * Biaya Operasional Pendidikan telah diberikan di dalam Program BOS

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

2.3.6. Ketepatan Waktu Penyaluran Manfaat BSM

Ketepatan waktu penyaluran Program BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa/peserta didik dari keluarga miskin (antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan). Selama pelaksanaan Program BSM hingga awal tahun 2012, manfaat Program BSM baru diterima oleh siswa pada bulan Maret dan September sedangkan penyaluran manfaat BSM di bulan Juni sangat rendah. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K menemukan bahwa waktu/masa kritis siswa dimana siswa/keluarga/rumah tinggal berada pada saat akhir tahun pelajaran di bulan Mei hingga Jui dan pada awal Tahun Pelajaran di bulan Juli terutama saat siswa transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya (seperti dari SD/MI ke SMP/MTs; dari SMP ke SMA/SMK/MA).

Gambar 2.2. Evaluasi Keberlanjutan Pendidikan berdasarkan Kuantil Pengeluaran



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

2.3.7. Kebijakan Perbaikan Pelaksanaan Program BSM

Berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan Program BSM pada periode sebelum 2012, Sekretariat TNP2K kemudian mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program BSM kepada Kemendikbud dan Kemenag sebagai pelaksana Program BSM. Rekomendasi perbaikan program dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk:

1. Memastikan keberlanjutan pendidikan siswa penerima program BSM dari keluarga/rumah tangga miskin antar kelas dan jenjang pendidikan terutama bagi siswa/peserta didik yang berada pada periode transisi.
2. Memastikan adanya peningkatan cakupan penerima BSM dan peningkatan nilai/manfaat BSM secara bertahap dimana diharapkan Program BSM dapat menjangkau lebih banyak siswa miskin dan rentan maupun anak

yang belum dan tidak lagi bersekolah. Nilai/manfaat Program BSM juga terus dipastikan ada peningkatan agar kebutuhan personal pendidikan siswa/peserta didik dari keluarga miskin dan rentan, dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Tahapan pelaksanaan rekomendasi kebijakan ini dilakukan sesuai dengan karakteristik pelaksanaan Program BSM. Pelaksanaan Program BSM memiliki karakteristik program yang cukup kompleks dan unik dari segi pelaksanaan secara kebijakan, teknis maupun administratif. Salah satu contoh adalah program ini dilaksanakan oleh beberapa Direktorat Pelaksana teknis di dua Kementerian yang berbeda (Kemdikbud dan Kemenag), yaitu Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pendidikan SMK, dan Direktorat Pendidikan Madrasah.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Sekretariat TNP2K untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan Program BSM, direncanakan secara bertahap melalui proses advokasi, lokakarya teknis serta kegiatan koordinasi (baik formal maupun informal) yang intensif sejak awal tahun 2012 dengan Kemdikbud dan Kemenag.

Advokasi dan koordinasi yang terus dilakukan oleh Sekretariat TNP2K penting untuk memastikan agar kedua Kementerian tersebut memiliki komitmen dan pemahaman yang sama terutama mengenai pentingnya perbaikan ketepatan sasaran program, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran, agar di dalam rekomendasi kebijakan perbaikan program, kedua Kementerian dapat

berkontribusi dan turut serta secara aktif dalam memantau dan mengevaluasi efektifitas perbaikan program dengan baik.

Reformasi yang pertama kali dilakukan oleh TNP2K adalah melakukan perbaikan penetapan sasaran BSM. Perbaikan ini dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pemanfaatan informasi yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sumber data calon siswa penerima BSM. Mekanisme yang kedua terkait dengan proses alur usulan siswa calon penerima BSM dari tingkat sekolah/madrasah hingga ke tingkat pusat.

Sasaran dari penerima program BSM dan meningkatkan cakupan penerima BSM yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin, dengan memanfaatkan informasi dari BDT dan melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM (selanjutnya disebut sebagai Kartu BSM) di tahun 2012 dan di tahun 2013 – melalui pengiriman Kartu Perlindungan Sosial/KPS.

Gambar 2.3. Rekomendasi Perubahan Mekanisme Penetapan Sasaran Penerima Program BSM



Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Perbaikan pelaksanaan Program BSM ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pelaksanaan perbaikan Program BSM pada tahun 2012 di fokuskan dan dirancang sebagai upaya untuk membantu meningkatkan keberlanjutan pendidikan dari siswa dari keluarga/rumah tangga miskin yang berada di periode transisi (kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke kelas 7 SMP di bawah Kemdikbud) sebanyak sekitar 281.909 siswa. Metode penetapan sasaran program BSM dimodifikasi dari pemilihan sasaran berdasarkan sekolah menjadi penetapan sasaran program secara langsung kepada siswa/peserta didik yang teridentifikasi dari rumah tangga miskin berdasarkan informasi individu dalam rumah tangga di Basis Data Terpadu dan melalui pengiriman Kartu BSM).

Bersama – sama dengan Direktorat Pembinaan SD dan SMP - Kemdikbud dan juga Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag, tahap kedua dari perbaikan program BSM di rencanakan kembali pada awal tahun 2013, yang awalnya menysasar kurang lebih 670,000 siswa/peserta didik yang berpotensi menjadi penerima BSM di seluruh Indonesia, dengan rincian rencana sasaran 220,000 siswa baru yang akan masuk ke kelas 1 SD dan 450,000 siswa baru kelas 7 SMP/MTs di Tahun Pelajaran (TA) 2013/2014. Namun demikian, sebelum tahap kedua perbaikan Program BSM dapat terlaksana, Pemerintah Indonesia di pertengahan tahun 2013 mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan merelokasi penghematan anggaran menjadi paket kompensasi untuk 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan melalui beberapa program – program bantuan sosial yang selama ini telah ada, termasuk Program BSM, atau yang disebut Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Manfaat dari

Program BSM juga ditingkatkan dan cakupan sasaran program juga meningkat untuk siswa/peserta didik di semua jenjang pendidikan (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah - SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MTs).

Pada bulan Juni 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan menyediakan program kompensasi untuk rumah tangga miskin dan rentan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Program Perluasan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P4S) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kemudian diluncurkan di mana khusus untuk Program BSM, anggaran Program BSM bagi Kemdikbud dan Kemenag meningkat melalui proses APBN-P 2013.

Cakupan penerima Program BSM bertambah menjadi 15,4 juta anak – anak usia sekolah (dari 8,7 juta siswa di awal tahun 2013), yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga di seluruh Indonesia teridentifikasi sebagai miskin dan rentan berdasarkan informasi dari BDT dan berhak menerima KPS ditambah dengan cadangan sehingga total menjadi 16,6 juta siswa. Rumah tangga dengan anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah dan memiliki KPS/Kartu BSM berhak untuk menerima manfaat Program BSM sebagai bagian dari Program Kompensasi BBM – P4S.

Tabel 2.3. Kuota Penerima Program BSM 2013 dan 2014

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	2013	2013 (APBN-P 2013)	2014
1	SD	20.875.203	3.530.305	8.062.561	6.046.921
2	SMP	9.643.957	1.246.712	2.893.187	2.169.890
3	SMA	8.087.227	561.832	678.790	550.000
4	SMK		619.862	1.018.185	425.033
Kemdikbud		45.206.387	5.958.731	12.652.723	9.191.844
1	MI	3.593.000	1.436.228	1.436.228	819.336
2	MTs	3.353.000	950.291	950.291	765.491
3	MA	1.130.000	392.729	392.729	354.929
Kemenag		8.082.000	2.779.248	2.779.248	1.939.756
Total		53.288.387	8.737.979	15.431.971	11.131.600

Sumber : <http://www.tnp2k.go.id/>, 2015

Selain penambahan cakupan penerima BSM, kompensasi kenaikan harga BBM juga diikuti dengan peningkatan besaran manfaat BSM. Nilai dari manfaat Program BSM meningkat dari Rp380.000 per siswa per tahun pelajaran menjadi Rp450.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SD/MI, dan dari Rp550.000 per siswa per tahun menjadi Rp750.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, nilai/manfaat Program BSM telah mengalami kenaikan di awal tahun anggaran 2013 yaitu dari Rp750.000 per siswa per tahun, menjadi Rp 1.000.000 juta per siswa per tahun pelajaran.

Reformasi ketiga yang dilakukan seiring dengan berjalannya Program Kompensasi kenaikan BBM adalah perbaikan waktu penyaluran BSM. Penyaluran manfaat BSM dimodifikasi dari sekali menjadi dua kali penyaluran per tahun pelajaran. Pembayaran pertama dilakukan pada awal tahun pelajaran di Semester 1 (sekitar bulan Agustus/September) dan pembayaran kedua dilakukan di Semester ke 2 tahun pelajaran (sekitar bulan Maret/April). Perubahan waktu pembayaran manfaat BSM ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan

tingkat drop out dari siswa/peserta didik yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin dan rentan, serta juga membantu memastikan tingkat keberlanjutan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kota Sibolga serta Dinas Pendidikan Kota Sibolga. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan pada SMK Negeri 3 Sibolga dikarenakan SMKN tersebut memiliki jumlah siswa yang tergolong banyak menerima program BSM.

3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik “snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun

informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga.

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga, subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan, antara lain Dewan Pendidikan Kota Sibolga 1 orang, Dinas Pendidikan Kota Sibolga 3 orang, Komite Sekolah 5 orang, Wakil Kepala Sekolah, guru 3 orang serta wali murid sebanyak 5 orang. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer*, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam implementasi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga.

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sibolga berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi..

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi

data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo.* 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Budi, Winarno.* 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
- Dunn, William.* 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik(edisi kedua)
.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Faisal, Sanapiah .*1990. Penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi.Malang :
IKIP YA3 Malang
- Islamy, M Irfan.* 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
- Irawan Soerhatono,* 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja
Rosdakarya
- Keban, Yeremias T..* 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,
Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava media
- Lilik, Mas Roro.* 2009. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau
Program, (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra
- Moleong, Lexy.* 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya
- Nugroho, Riant.* 2011. Publik Policy. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne.* 2008. Publik policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani,* 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta

Saebeni, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung :
Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Asdi
Mahasatya.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana.

Usman, Husaini. Purnomo Setiadi A. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.
Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media
Presindo

Jurnal

Syafriarti, 2015, Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam Memberikan Layanan Pendidikan, *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, Vol 3, No 1.

Kurnia Oktavia, 2014, Impelementasi Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) di SDN Candinegoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, *Jurnak Publica Unesa*, Vol 2, No 3

Sri Esnawati, 2014, Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP Negeri 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *e-Jurnal UNY*, Vol III, No 3

Peraturan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Sumber Lain

Buku panduan pelaksanaan BSM Tingkat SMK Tahun 2013

BPS, Maret 2014, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 28 Juta.

<http://www.beritasatu.com/nasional/193810-bps-maret-2014-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-28-juta.html>

Kliping pendidikan pendidikan kaum marjinal Sept 2014 - Des 2014